

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar, terarah dan disertai dengan pemahaman yang baik untuk menciptakan perubahan-perubahan yang diharapkan pada perilaku individu dan selanjutnya pada perilaku jamaah atau komunitas di mana individu itu hidup, termasuk usaha internalisasi dan sosialisasi paham multikulturalisme di mana peserta didik itu hidup.

Jika multikulturalisme diakui sebagai sikap yang mengakui dan menghargai keadaan yang majemuk secara etnis, kebudayaan dan keagamaan tertentu, maka sikap ini harus ditumbuhkembangkan pada generasi muda melalui pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara kerukunan antar agama.

Terdapat serentetan kerusuhan-kerusuhan yang berbau SARA di Indonesia seperti yang terjadi di Lombok (2000), Pontianak (1997), Banjarmasin (1997), Medan (1996) ditambah lagi kerusuhan sektarian antara kaum Muslim dan Kristen di Ambon sampai saat ini masih terdapat benih-benih permusuhan itu, Dayak dan Madura di Sambas sekitar tahun 1999. Semuanya menunjukkan belum dilaksanakannya sikap saling menghargai dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Kerusuhan-kerusuhan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa secara kolektif kita tidak mau belajar tentang bagaimana hidup bersama secara rukun.

Bahkan agenda sosialisasi utama seperti keluarga dan pendidikan nampaknya belum berhasil menanamkan sikap toleransi-inklusif dan tidak mampu mengajarkan untuk hidup bersama dalam masyarakat plural.

Kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan plural, hal ini ditandai dengan keberagaman masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa, bahkan untuk daerah tertentu saja, seperti Sumbawa, yang berada di ujung Indonesia bagian tengah setelah Bali dan Lombok, terdiri dari berbagai macam bahasa. Bahkan masing-masing desa yang kadang berdampingan pun berbeda bahasa yang digunakan. Hal ini ditandai dengan kemajemukan bangsa ini yang tidak bisa dipungkiri. Justru masyarakat harus bangga dengan bangsa yang multikultur ini.

Mengamati fenomena kemajemukan ini, salah seorang sosiolog Amerika Serikat, Hildred Geertz secara tepat melukiskan sebagai berikut:

Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing dengan identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari 250 bahasa dipakai ... dan hampir semua agama penting dunia diwakili, selain agama-agama asli yang banyak jumlahnya. (Isma'il SM, 2002:229)

Kemajemukan atau multikultural bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan dari segi etnis, budaya, bahasa dan agama merupakan realitas sejarah yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Sejak masa kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan, kemajemukan telah menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia.

Multikulturalisme merupakan wacana bagi para akademisi maupun praktisi dalam berbagai bidang di Indonesia dewasa ini. Beberapa topik bahasan membahas mengenai multikulturalisme, seperti yang baru-baru ini

diselenggarakan mengenai pembangunan Indonesia yang berwawasan kebudayaan. Demikian pula telah muncul pendapat mengenai cara-cara pemecahan konflik horizontal yang nyaris memecahkan persatuan bangsa dari sudut kebudayaan dan bukan melalui cara-cara kekerasan atau cara-cara lain yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam.

Pada saat republik Indonesia dibangun, para pendiri bangsa menyadari adanya kemajemukan sebagai realita sosial budaya yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya. *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tapi tetap satu jua) merupakan simbol dan visi bersama yang dapat menyatukan bangsa

Bhinneka Tunggal Ika jelas merefleksikan keinginan kuat para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebuah *nation* baru yang kuat. Ratusan jumlah etnik, budaya, agama adat istiadat dan bahasa tersebar di lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil dari Sabang hingga Merauke. Pluralisme multidimensional inilah yang merupakan rahmat untuk membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona (Syamsul Ma'arif, 2005: XI).

Kalau kita cermati kondisi bangsa Indonesia di era kontemporer ini, maka gagasan seputar wacana multikultural semakin santer terdengar. Maraknya gagasan multikultural dalam keberagaman tersebut tampaknya berbarengan atau beriringan dengan perluasan ragam pemikiran kritis di kalangan intelektual muda Muslim. Antara lain, dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) yang sebagian mempertajam dialog antar pemikiran yang diberi label lebih *Konservatif*, *revivalis*, dan liberal progresif. Pemicu gagasan demikian lebih banyak bertaut dengan model komunikasi yang semakin terbuka dan global, selain

pengalaman keberagaman yang di negeri ini terus dilanda konflik serta kekerasan (Mul Khan 2005: 1).

Melihat hal diatas kiranya perlu nilai-nilai multikultural tersebut diwariskan atau ditransfer dalam bentuk pengajaran. Bidang yang berfungsi mewariskan nilai-nilai multikultural agar apa yang dicita-citakan seperti keinginan para pendiri bangsa benar-benar bisa termanifestasi yaitu bidang pendidikan. Bidang ini tentunya memiliki peran vital, jika bangsa ini ingin bersungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai multikultural.

Jika kita melihat sejarah, maka pendidikan multikultural sebenarnya telah lahir sejak 30 tahun yang silam, yaitu sesudah perang dunia ke II (PD II), dengan lahirnya banyak negara-negara dan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya gerakan kemerdekaan bukan hanya di negara-negara bekas penjajahan tetapi juga di negara-negara maju, terjadi tantangan tentang prinsip hidup demokrasi. Di negara-negara bekas jajahan munculah gerakan yang dapat disebut *poskolonialisme*.

John Dewey dalam bukunya yang terkenal *Democracy and Education* yang diterbitkan pada permulaan abad 20, mengungkapkan bahwa masalah demokrasi telah menjadi masalah dunia karena proses demokratisasi sedang mengubah kehidupan manusia global. Dan pendidikan multikultural telah menjadi topik diskusi maupun praktik pendidikan pada beberapa negara maju dengan mengambil tema pentingnya kebudayaan dalam praksis pendidikan untuk membangun suatu masyarakat demokratis (H. A.R Tilaar 2003: 162).

Di tengah perkembangan wacana multikultural yang merambah sampai ke dalam konsep-konsep pendidikan, khususnya pendidikan Islam kontemporer, tentunya dapat menambah semaraknya wacana pemikiran pendidikan di Indonesia. Dan akhirnya tokoh-tokoh yang mencoba memberi kritik dan gagasannya tentang hal tersebut semakin banyak bermunculan. Salah satu tokoh yang mencoba mengeluarkan gagasannya tentang multikultural adalah Abdul Munir Mulkan. Beliau adalah salah seorang tokoh intelektual di Muhammadiyah yang memiliki gagasan gemilang tentang wacana-wacana kontemporer. Dalam dunia akademisi, namanya sudah sangat terkenal karena karya tulisnya yang telah banyak menghiasi dunia pemikiran di Indonesia. Maupun tulisannya yang dimuat dalam media cetak maupun elektronik.

Dalam perhitungan penulis ada sekitar 31 buku yang telah ia tulis dan berbagai artikel yang bertebaran di media cetak. Dan banyak artikelnya tentang multikulturalisme yang dimuat baik media cetak maupun elektronik. tentunya ini semua membuktikan bahwa keluasan ilmu yang dimiliki oleh Abdul Munir Mulkan benar-benar tidak bisa diragukan.

Dalam kaitannya dengan wacana multikultural. Abdul Munir Mulkan turut memberikan kritik dan gagasan dalam pendidikan Islam. walaupun ia tidak terlalu jauh membahas tentang bagaimana praksis pendidikan multikultural, Tetapi Munir Mulkan mencoba menerangkan pada tataran konseptual-filosofi dan pendidikan multikultural khususnya dalam Islam. Jelas pendidikan multikultural yang diterangkan oleh Munir Mulkan mengarah kepada pemikiran pendidikan Islam Multikultural. Hal inilah yang akan diteliti oleh penulis untuk menambah

khazanah konsep pendidikan Islam. Ide dan gagasan pendidikan Multikultural lebih banyak kita temukan dalam bukunya yang berjudul "*Kesalehaan Multikultural*" (2005).

Mulkan memberikan gagasannya berangkat dari pertanyaan ada tidaknya basis teori pendidikan Islam sebagai dasar penyelenggaraan proses belajar mengajar? Hal ini relevan diajukan jika memandang bahwa pendidikan Islam merupakan sistem tersendiri yang berbeda dengan pendidikan yang lain pada umumnya. Ditambah adanya pandangan pendidikan Islam memiliki teori sendiri dan karena itu layak diperlakukan serta dikelola secara sendiri. Namun realitasnya, batang tubuh teori pendidikan Islam yang bisa dibedakan dari teori pendidikan lain yang sering kali dituduh sekuler itu tak bisa diperlihatkan. Bahkan secara sadar dan penuh kesengajaan, walaupun enggan diakui, praktik pendidikan Islam dikelola berdasarkan teori dan teknologi pendidikan yang sekuler tersebut.

Karena itu tuduhan pendidikan Islam dibangun berdasarkan kepentingan politik sulit dibantah, hingga saat ini, belum juga tersusun basis teoritik yang kukuh dan mandiri. Di sinilah letak pentingnya melakukan kritik epistemologis terhadap praktik pendidikan Islam atau pendidikan agama

Islam yang selama ini dijalankan. Dan adapun pertanyaan penting yang perlu dijawab terhadap tujuan pendidikan agama (Islam) diatas ialah hubungannya dengan penerimaan peserta didik pada pluralisme agama. Jawaban penting menurut Munir yang dapat dikaitkan dengan pertanyaan mendasar lainnya adalah: "Apakah kesadaran atau penerimaan pada pluralisme keagamaan menjadi orientasi pendidikan tauhid, dan apakah pendidikan tauhid bersifat eksklusif atau

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami secara mendasar tujuan, kurikulum dan metode pendidikan multikultural dalam perspektif Abdul Munir Mul Khan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang nantinya dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Dapat memperkaya wawasan tentang pendidikan multikultural dan konsep maupun nilai-nilai filosofi dari beberapa tokoh Islam yang ingin mengeluarkan gagasan cemerlangnya tentang pendidikan, agar semua orang bisa merasakannya, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Agama Islam, Jurusan Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam).

b. Secara Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya di dunia pendidikan, sehingga budaya toleransi terhadap perbedaan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan konflik yang biasa terjadi akibat perbedaan ras, etnik maupun agama tidak terjadi lagi.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pengamatan penulis setelah menelaah berbagai tulisan yang tentang pendidikan multikultural, maka dalam menelaah pemikiran multikultural Abdul Munir Mul Khan yang terdapat dalam berbagai tulisannya, ada yang sudah

dibukukan, ada juga yang belum dibukukan, di antaranya, pertama, *kesalehan multikultural* yang diterbitkan PSAP pada tahun 2005. Dalam buku ini penulis memaparkan secara luas tentang kesalehan multikultural dari persoalan kesalehan yang dibutuhkan dalam dialog lintas agama dan budaya untuk menjawab persoalan global.

Dalam bab kedua buku ini mengungkap persoalan teologi kontekstual, dari persoalan korupsi, kekerasan, etika lingkungan dan kesalehan yang berpihak pada kaum tertindas. Bab selanjutnya mengungkap persoalan dakwah dan pendidikan multikultural. Secara filosofis dan teoritis penelitian ini akan sedikit banyak membahas persoalan pendidikan multikultural yang penulis teliti akan di ambil dari bab ini.

Penelusuran selanjutnya tentang pendidikan multikultural dalam pemikiran Munir Mul Khan akan penulis telusuri dari buku *Nalar Spiritual Pendidikan* yang diterbitkan oleh Tiara Wacana pada tahun 2002. Buku ini tidak begitu jauh pembahasannya dengan buku pertama yaitu *Kesalehan Multikultural*, secara umum buku ini juga membahas tentang persoalan-persoalan pendidikan, diantaranya bahwa perlunya pendidikan, khususnya pendidikan Islam menentukan arah yang jelas khususnya mengenai tujuan pendidikan. Persoalan humanisasi pendidikan juga dibahas cukup jauh dalam bab kedua buku ini.

Nalar Spiritual Pendidikan seperti halnya juga buku sebelumnya adalah kumpulan tulisan yang pernah disampaikan dalam berbagai pertemuan, juga telah dimuat dalam berbagai koran dan majalah. Karena buku yang semulanya adalah kumpulan tulisan dan tulisan-tulisan berserakan di media cetak, maka bagi

peneliti sangatlah sulit sekali menemukan benang merah dari buku tersebut. Karya setebal 386 halaman ditambah halaman bagian awal ini dibagi menjadi lima bagian. Dalam bagian-bagian itu terungkap persoalan-persoalan pendidikan seperti yang peneliti uraikan sebelumnya.

Untuk kurikulum pendidikan multikultural yang peneliti bahas dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan pemikiran Syamsul Ma'arif yang tertuang dalam buku pendidikan pluralisme di Indonesia yang diterbitkan oleh Logung Pustaka pada tahun 2005. Buku ini membahas secara rinci tentang pendidikan pluralisme dan pendidikan multikultural di Indonesia sebagai sebuah tawaran untuk model pendidikan masa depan. Dari buku ini juga penulis akan mengungkap penelitian ini khususnya dari segi kurikulum pendidikan multikultural.

Penulis juga menemukan skripsi yang membahas tentang pemikiran Abdul Munir Mul Khan yang berkaitan dengan pendidikan Islam yaitu, *Pemikiran Abdul Munir Mul Khan tentang Pembaharuan Pendidikan Islam* yang ditulis oleh Nuruddin pada tahun 2004 sebagai tugas akhirnya menempuh serjana pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga. dalam skripsi tersebut lebih jauh ingin mengungkapkan pemikiran Abdul Munir Mul Khan dalam menanggapi pemahaman sebagian besar orang yang hanya melihat pendidikan Islam sebagai pendidikan yang berazaskan nama Islam. Pendidikan Islam adalah proses belajar hidup guna mengatasi keburukan dan mengembangkan kebaikan dengan kesadaran diri mengakui kekuasaan akal untuk mewujudkan kehidupan yang bermanfaat bagi semua manusia (*rahmatan lili 'alainin*)

Penelitian kali ini penulis akan mencoba memfokuskan pemikirannya pada masalah **“Pendidikan Multikultural”**. Terkait pendidikan multikultural dalam pandangan Munir Mulkan, akar ontologis pendidikan Islam, kritik terhadap pendidikan Islam, kesalahan multikultural, humanisasi pendidikan Islam, kearifan tradisional dalam pendidikan, ilmu dalam lintas batas budaya. Jelas dalam penelitian ini ciri khas pemikiran Abdul Munir Mulkan tidak bisa dipisahkan seperti penelitian sebelumnya. Dan penelitian ini lebih dekat dengan apa yang telah diteliti oleh Nuruddin (2004), dengan tema Pemikiran Abdul Munir Mulkan tentang Pembaharuan Pendidikan Islam.

E. Karangka Teoritik

1. Pengertian, Asas, Tujuan, dan metode pendidikan

a. Arti Pendidikan

Untuk memahami pengertian pendidikan dengan benar, pendidikan dapat dibedakan dari dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti teoritis-filosofis dan pengertian dalam arti praktis. Pendidikan dalam arti teoritis filosofis adalah pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk menyusun dan memecahkan teori-teori baru dengan mendasarkan pada pemikiran normatif, spekulatif, rasional, empirik, rasional filosofis. Sedangkan dalam arti praktik, adalah suatu proses pemindahan pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subyek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai yang utama. (Thoha, 1996:98)

Berdasarkan kedua pengertian pendidikan tersebut, bagaimanakah definisi yang tepat untuk menghadapi era globalisasi yang ditandai pluralisme dan multikulturalisme? Dalam hal ini, Ibrahim Ismet Muthawi'(1979:63-65), agaknya telah memberikan definisi pendidikan secara tepat. Ungkapnya, pendidikan harus diartikan sebagai proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan intergral. Meminjam terminologi H.A.R.Tilaar (2000:56) yang mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan. Artinya, pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan yang berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan dan begitu pula tidak adak pendidikan dalam ruang vakum tanpa selalu berada di dalam lingkup kebudayaan yang kongkrit. Pendidikan memang bukan hanya menghasilkan manusia yang pintar dan terdidik tetapi yang lebih penting ialah manusia yang terdidik dan berbudaya.

b. Asas Pendidikan

Asas pendidikan adalah prinsip atau kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir, baik pada perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan akan member corak khusus pada pendidikan, sehingga akan member corak pada hasil pendidikan bagi suatu masyarakat. Sebagai contoh dari asas dari pendidikan multikultural adalah kesadaran akan adanya kemajemukan, keragaman dan perbedaan. Prinsip itu juga searah dengan prinsip ketauhidan yang mengaku hanya Allah sajalah yang tunggal, denga pemahaman ketauhidan tersebut maka kita juga akan mengakui akan adanya ciptaan Tuhan yang majemuk, kita akan mengakui akan pluralitas, karena kalau saja Tuhan menghendaki akan adanya satu macam saja maka tidaklah sulit bagiNya.

Kajian terhadap landasan dan asas pendidikan akan membentuk wawasan yang tepat tentang pendidikan dan pada gilirannya akan memberikan peluang yang besar terhadap perencanaan dan penyalenggaraan pendidikan baik secara konseptual dan operasional. Dasar dan asas pendidikan berhubungan sangat erat dengan tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan itu dirumuskan berdasarkan dasar pendidikan.

c. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan, maka pendidikan akan menjadi logis bila dimulai dari tujuan yang ingin dicapai

Abudin Nata dalam bukunya filsafat pendidikan menyatakan bahwa tujuan pendidikan tidaklah bisa dipisahkan dari tujuan hidup manusia. Apabila tujuan hidup kita adalah agar mendapat kebahagiaan dunia dan akherat, maka pendidikan kita harus dikemas ke arah tersebut (Abudin Nata:1997:49).

d. Metode Pendidikan

Metode pendidikan adalah cara teratur untuk mencapai tujuan. Metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Metode pendidikan selalu berkaitan dengan proses pendidikan, yaitu bagaimana melaksanakan kegiatan pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan.

Dalam hal ini kita kenal berbagai bentuk metode pendidikan, penulis akan memaparkan tiga model pendidikan yang selalu digunakan dalam proses belajar

mengajar sebagai berikut: (1) bentuk pendidikan liberal, (2), bentuk pendidikan otoriter, (3), bentuk pendidikan demokratis.

Bentuk pendidikan otoriter, pendidikan dipaparkan pada pihak yang berkuasa dan utama (primer), sedangkan peserta didik ditempatkan pada posisi yang kedua (skunder). Peserta didik diberlakukan sebagai obyek pendidikan. Keadaan seperti ini banyak berlaku pada negar-negara komunis, dimana negara mengatur segalanya.

Bentuk pendidikan liberal menekankan pada hak individu dan kebebasan. Dalam pendidikan, anak dijadikan subyek yang memegang peran penting. Anak diberi kebebasan untuk mencapai kehidupan bebas. Kedudukan pendidik atau guru hanyalah sebagai pendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya.

Bentuk pendidikan demokratis, yakni bentuk pendidikan yang menempatkan pendidik dan peserta didik dalam kedudukan yang seimbang. Pendidik menempatkan diri sebagai pembimbing peserta didik, dilain pihak peserta didik mempunyai kedudukan sebagai obyek dan sebagai subyek.

Karena diantara peserta didik dan pendidik memiliki kedudukan yang seimbang, maka metode yang digunakan lebih mengarah pada metode diskusi, Tanya jawab, pemberian tugas, problem solving dan berjalan dalam suasana yang dialogis.

Dalam membedah pemikiran Abdul Munir Mul Khan dengan pendidikan multikulturalnya maka metode pendidikan yang kiranya sesuai dengan hal tersebut

adalah metode pendidikan yang ketiga yaitu metode demokratis (Sumitro dkk, 1998:76).

2. Pengertian, sejarah, ciri-ciri dan tujuan pendidikan multikultural

a. Pendidikan Multikultural

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani (*Paedagogie*) ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. (M. Ngalim Purwanto, MP 2000: 10).

Multikultural berasal dari dua kata yaitu multi dan kultural, multi berarti banyak (jamak) lebih dari satu, sedangkan kultural berarti kebudayaan. Sebagai sebuah terminologi multikultural dapat merujuk dari dua hal yang berbeda yaitu: realitas dan etika, atau praktik dan ajaran. Sebagai realitas atau praktik, multikultural dipahami sebagai bentuk representasi yang produktif atas interaksi diantara elemen-elemen sosial yang beragam dalam sebuah tatanan kehidupan kolektif yang berkelanjutan. Sedang sebagai sebuah etika atau ajaran, multikultural merujuk pada spirit, etos, dan kepercayaan tentang bagaimana keragaman atas unit-unit sosial yang berciri privat dan relatif otonom itu, seperti etnisitas dan budaya, semestinya dikelola dalam ruang-ruang publik (Martono 2003:10).

Jika digabungkan kedua kata tersebut menjadi Pendidikan Multikultural, maka bisa dirumuskan sebagai suatu studi tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka

atau *prejudice* demi untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan tentram (A.R Tilaar, 2003:174).

Frans Magniz Suseno memberikan definisi terhadap pendidikan multikultural yaitu pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi dan cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama kita sehingga mampu melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memiliki baik perbedaan maupun cita-cita. Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan dan solidaritas (Magniz Suseno dalam *Suara Pembaharuan*, 23 september 2000).

Senada dengan Ainurrofiq Dawam yang menjelaskan definisi pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari keragaman etnis, budaya, agama. Pengertian pendidikan multikultural demikian tentunya mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan itu sendiri dipahami sebagai proses tiada akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki adanya penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari mana pun dia datang dan berbudaya apapun dia (Dawam, 2003:100).

Muhammad Ali (dalam *Kompas*, 26 April 2002 menyebutnya sebagai pendidikan yang berorientasi pada proses penyadaran yang berwawasan pluralis secara agama sekaligus berwawasan multikultural, seperti itu dengan sebutan "pendidika pluralis multikultural" menurutnya, pendidikan semacam itu harus dilihat sebagai bagian komprehensif mencegah dan menanggulangi konflik etnis

agama, radikalisme agama, seperatisme dan integrasi bangsa. Sedangkan nilai dasar konsep ini adalah toleransi.

Sejalan dengan pemikiran diatas, Muhaimin al Ma'hady dalam khoirul Mahfud berpendapat, bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global) (Choirul Mahfud, 2006: 168)

Dalam buku *Multikultural Education: A Teacher Guide to Linking Contexts, Process and content*, Hilda Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultural, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam hal pendidikan. Atau dengan kata lain, bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikultural dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio-budaya yang melingkupinya.

Karena realitas sosial dan budaya merupakan keniscayaan yang ada bagi seorang individu atau kelompok masyarakat, sebagai bagian dari keragaman. Dengan demikian dari keragaman itu setiap individu harus dihargai sekaligus bertanggung-jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Peningkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognitions*) merupakan

akar dan segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan khususnya bidang pendidikan.

Pemikiran ini sesuai dengan pendapat Paulo Freire (pakar pendidikan pembebasan), bahwa pendidikan bukan merupakan “*menara gading*” yang menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan multikultural (*Multikultural Educations*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntunan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktifitas pendidikan untuk memasuki pandangan sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa. Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti, gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama (Choirul Mahfud, 2006: 169).

Pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas. Dalam pendidikan multikultural terkait masalah-masalah keadilan sosial (*sosial justice*), demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Tidak mengherankan apabila pendidikan multikulturalisme berkaitan dengan isu-isu politik, sosial kultural, moral, edukasional, dan agama. Tanpa kajian bidang-bidang ini maka sulit untuk diperoleh suatu pengertian mengenai pendidikan multikultural (H.A.R. Tijaar,

b. Sejarah Perkembangan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural telah lahir sekitar 30 tahun yang silam, yaitu sesudah Perang Dunia II (PD II) dengan lahirnya banyak negara dan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya gerakan kemerdekaan bukan hanya di negara-negara bekas jajahan. Munculnya gerakan yang dapat kita sebut poskolonialisme yang melihat dari praktik-praktik kolonial yang membedakan harkat manusia. (H.A.R Tilaar 2003: 164).

Dalam buku pendidikan multikultural, Ainul Yakin dijelaskan bahwa strategi pendidikan multikultural, sejak lama telah berkembang di Eropa, Amerika Serikat dan di negara-negara maju lainnya. Gagasan ini, dengan demikian bukan merupakan hal baru. Strategi ini adalah pengembangan dari studi interkultural dan multikultural. Dalam perkembangannya, studi ini menjadi sebuah studi khusus tentang pendidikan multikultural yang pada awalnya bertujuan agar populasi mayoritas dapat bersikap toleran terhadap para imigran baru. Studi ini juga mempunyai tujuan politis sebagai alat *control sosial* penguasa terhadap warganya, agar kondisi negara aman dan stabil. (Ainul Yakin, 2005: 23)

Namun dalam perkembangannya tujuan politis ini menipis dan bahkan hilang sama sekali karena "ruh" dan "nafas" dari pendidikan multikultural ini adalah demokrasi, humanisme dan pluralisme yang janti terhadap adanya kontrol manusia. Selanjutnya, pendidikan multikultural ini justru menjadi motor penggerak dalam menegakkan demokrasi, humanisme dan pluralisme yang dilakukan melalui sekolah, kampus dan institusi-institusi pendidikan lainnya

Sejarah kelam Eropa dan Amerika Serikat seperti kolonialisme, perang sipil di Amerika Serikat dan Perang Dunia I dan II, sebenarnya juga menjadi landasan utama kenapa pendidikan multikultural ini diaplikasikan di kedua benua besar tersebut. Sebagaimana yang tertulis dalam sejarah, pada tahun 1415 hingga awal ahun 1900-an negara-negara utama di Eropa, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis dan Belanda, telah melakukan ekspansi dan penjajahan terhadap negara-negara lain di Afrika, Asia dan Amerika. Kolonialisasi ini menyebabkan kerugian jiwa dan materi yang sangat besar bagi negara-negara yang terjajah. Ribuan bahkan jutaan warga jajahan menderita dan meninggal dunia, serta milyaran dollar hasil dari kekayaan alam negara jajahan telah dikuras oleh penjajah.

Kemudian, Perang Dunia I yang diawali pada tahun 1914 dan berlanjut menjadi Perang Dunia II yang dimulai pada tahun 1939 telah menyebabkan negara-negara Eropa tercerai-berai dan saling bermusuhan. Ribuan bahkan jutaan jiwa melayang, krisis ekonomi, politik dan sosial yang begitu dahsyat terjadi hampir di seluruh negara-negara Eropa sehingga pada waktu itu, pengangguran, kriminalitas, korupsi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Hal inilah yang menjadikan konsep pendidikan multikultural menjadi sangat penting bagi setiap bangsa.

Ada bangsa penjajah, bangsa super dan bangsa yang dijajah atau yang didominasi dengan bangsa lain. Termasuk dalam pandangan ini adalah pandangan supremasi kulit putih dan supremasi kebudayaan barat. Timbullah reaksi-reaksi

terhadap pandangan biner ini seperti munculnya gerakan orientalisme dan gerakan-gerakan poskolonialisme lainnya.

Di negara-negara yang maju termasuk bekas-bekas penjajahan maupun negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, terdapat tantangan terhadap praktik-praktik kehidupan demokrasi. Di Amerika Serikat, kita kenal mengenai rasisme yang melahirkan manusia seperti Martin Luther King dan gerakan-gerakan yang menghapuskan rasisme dalam praktik kehidupan. Pemikiran-pemikiran ini merembes ke dalam dunia pendidikan. (H.A.R Tilaar, 2003: 165).

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II pada tanggal 24 Oktober 1945 berdiri *the United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu program kerja PBB adalah bidang pendidikan melalui organisasi yang bernama *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)*, yang berdiri pada tanggal 4 September 1948. Tujuan *UNESCO* adalah untuk memberi kontribusi bagi upaya perdamaian dan keamanan dengan jalan mempromosikan kerja sama antar beberapa negara di beberapa bidang khususnya pendidikan. Hal ini merupakan jalan menuju perkembangan pendidikan multikultural. (Assegaf 2003: 20).

Penjelasan di atas merupakan sejarah singkat perkembangan pendidikan multikultural yang bisa penulis jabarkan. Tetapi penting pula dalam penulisan sejarah ini penulis melihat akar sejarah, terkait kajian yang pernah diadakan sebelum munculnya isu pendidikan multikultural :

1. Studi Kultural Inggris

Sebelum muncul pendidikan multikultural, telah lahir studi kultural yang tidak lepas dari lahirnya *Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS)* di Universitas Birmingham Inggris pada tahun 1946. Para pendiri kajian itu antara lain Richard Hoggart, Raymond Williams, E.P. Thompson, dan Stuart Hall, merupakan akademisi yang pada saat itu dicap sebagai golongan Marxis. Pada saat itu Perang Dingin masih marak yang juga mempengaruhi studi Marxisme di lingkungan Universitas (H. A.R Tilaar, 2003: 8).

Lahirnya studi ini di Inggris bukan secara kebetulan tetapi karena di Inggris terdapat partai buruh yang tentunya tidak asing dengan studi ajaran-ajaran mengenai gerakan-gerakan kaum buruh. Pada tahun 1972 lembaga CCCS ini mulai lebih dikenal di seluruh dunia, khususnya ketika mereka mengeluarkan tulisan-tulisan yang pertama mengenai "*culture studies*". Sejak tahun itu, boleh dikatakan studi kultural mulai dapat perhatian khususnya di negara-negara non-komunis.

2. Studi Kultural Amerika Serikat

Di Amerika Serikat masuknya *culture studies* dimulai dari universitas-universitas, khususnya dalam kegiatan-kegiatan tradisional bidang kebudayaan dalam arti sempit yaitu sekitar tahun 1980-an. Selain itu perhatian kuat terhadap studi kultural di Amerika Serikat ditandai dengan diadakannya seminar besar di Universitas Of Illionis pada tanggal 4-9 April 1990. Tidak kurang dari 900 pakar dunia dalam berbagai bidang budaya datang dan laporan hasil seminar ini didokumentasi oleh Laurence Grossberg. Selanjutnya kajian kebudayaan ini

mendapat perhatian serius dari akademisi studi sosial di Amerika Serikat. Dan kebetulan saja garapan ini lebih sesuai dengan kondisi Amerika Serikat sebagai tempat lahirnya praktik-praktik perbedaan rasial. (H.A.R Tilaar, 2003: 9).

Misalnya, pada tahun 1861-1865, Amerika telah mengalami tragedi yang sangat menyakitkan yaitu perang sipil. Perang yang diakibatkan oleh adanya isu pertentangan ras dan etnis ini telah merenggut ratusan ribu jiwa. (Ainul Yakin, 2005: 25).

Penemuan *culture studies* Amerika Serikat memberikan angin segar bagi perkembangan studi ini karena *cultur studies* dan tentunya mendapat corak yang lain terutama penolakan terhadap ajaran-ajaran Marxisme ortodoks. Hal ini terkait persepsi bangsa Amerika Serikat yang memandang marxisme masih menjadi momok menakutkan setelah Perang Dunia ke II di Amerika Serikat.

Selain itu, perkembangan Studi kultural Amerika Serikat telah melahirkan pandangan-pandangan baru tentang hubungan kelompok rasial, lalu dimulai pula kajian politik identitas kelompok-kelompok minoritas. Dengan sendirinya paham Multikulturalisme pun mulai berkembang karena merupakan kebutuhan dari pluralisme masyarakat Amerika Serikat. Dalam kaitan ini, media komunikasi massa memiliki peranan penting dalam pembentukan kebudayaan dan transformasi kebudayaan. Kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat yang dianggap sebagai pemimpin dunia dalam bidang demokrasi memerlukan waktu ratusan tahun untuk mulai menerapkan pendidikan multikultural dalam pendidikan (H. A.R Tilaar,

Dan ternyata, sejarah pendidikan Amerika Serikat harus mengenal perubahan tersebut secara nyata pada dekade terakhir abad 20, yaitu ketika mulai dikembangkan reformasi pendidikan *top-down*. Sebelumnya, Amerika Serikat yang dianggap sebagai pentolan demokrasi ternyata menerapkan suatu sistem yang mematikan budaya-budaya minoritas dan telah mengembangkan tirani mayoritas dari kebudayaan putih (Imam, 2004: viii).

3. Studi Kultural di beberapa Negara

Studi kultural masuk ke negara Kanada sekitar tahun 1980-an, berangkat dari kendala melihat keadaan negaranya yang begitu luas dan penduduknya yang jarang. Dengan demikian masalah komunikasi menjadi hal yang penting dalam pengembangan budaya Kanada. Sedangkan negara Australia *culture studies* masuk sekitar tahun 1970-an. Australia juga melanjutkan studi kultural Inggris tetapi ia berusaha mencari identitas dirinya sendiri sebagai bangsa Australia dan menjadi perhatiannya pada sastra dan film. Film yang dikembangkan dalam rangka nasionalisme. Dengan semakin majemuknya masyarakat Australia pemerintah akhirnya mendirikan *Departement of Multikultural Affairs* (H. A.R Tilaar, 2003: 20).

Bagaimana dengan studi kultural di Perancis? Pengembangan studi kultural di Perancis berkaitan erat dengan proses dekolonisasi. Sebagai suatu bekas negara super power dekolonisasi menyisakan banyak masalah kebudayaan seperti bahasa dan kebudayaan Perancis. Studi kultural dimulai sekitar tahun 1960-an salah satunya membicarakan mengenai runtuhnya

kebudayaan Perancis dengan masuknya kebudayaan coca-cola dari Amerika Serikat.

4. Studi Kultural Asia

Selanjutnya kalau kita melihat studi kultural di negara Asia, di Asia, dapat ditonjolkan pengembangan studi kultural di India yang bahkan mendahului pusat pengembangan CCCS di Inggris. Pada tahun 1963 di New Delhi didirikan Center for Study Of Developing Society (CSDC). Pusat ini dapat dikatakan pelopor dari studi kultural di Asia bahkan di dunia. Pusat ini antara lain meneliti mengenai transformasi masyarakat *primitif* menuju masyarakat modern. Selain itu, pusat New Delhi mencerminkan bagaimana terbentuknya budaya-budaya di Asia yang terkenal memiliki kebudayaan yang sangat tua dan mencoba melihat kembali budaya Asia yang dianggap marginal. (H.A.R Tilaar, 2003: 23).

5. Studi Kultural Indonesia

Dalam gerakan kemerdekaan sendiri, bangsa Indonesia sejak kebangkitan nasional telah menunjukkan upaya membangun masyarakat dan bangsa berdasarkan kesatuan kultural. Ada dua tokoh yang dianggap peletak dasar studi kultural di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara dan Dr. Soedjatmiko. Kedua tokoh inilah yang merupakan pemikir sosial yang mencoba mengeluarkan gagasan atau konsep kebudayaan yang dekat dengan studi kultural. (H. A.R Tilaar, 2003: 27).

Selain itu munculnya gerakan Budi Utomo yang didasarkan pada kebudayaan Jawa. perkumpulan-perkumpulan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Selebes dan sebagainya menunjukkan kebinekaan dari masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, ikatan-ikatan yang didasarkan pada identitas suku ini disatukan di dalam Sumpah Pemuda yang bertujuan membangun satu kebudayaan Indonesia.

Itulah gambaran dari perjalanan studi kultural Inggris hingga ke negara-negara lain yang ada di belahan dunia. Dan ternyata ketika kajian ini masuk ke universitas-universitas Amerika Serikat ada pembicaraan khusus dalam kaitannya tentang pendidikan multikultural. Dari sinilah penyebaran pendidikan multikultural hingga selanjutnya masuk ke Indonesia.

Jika kita melihat pendidikan multikulturalisme untuk Indonesia, memang wacana ini baru kita mulai. Kita belum mempunyai pengalaman mengenai hal ini. Apalagi otonomi daerah baru kita cobakan. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan persiapan yang cukup lama untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Bentuk-bentuk dan sistem yang cocok bagi Indonesia bukan hanya memerlukan pemikiran akademik dan analisis budaya atas masyarakat Indonesia yang pluralistik itu, tetapi juga meminta suatu kerja keras untuk melaksanakannya.

Gagasan multikulturalisme bukan hanya merupakan suatu yang abstrak tetapi suatu pengembangan suatu pola tingkah laku yang hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Selain itu multikulturalisme tidak hanya berhenti pada pengakuan akan identitas suatu kelompok masyarakat atau suatu suku tetapi juga ditunjukkan kepada terwujudnya integrasi nasional melalui budaya yang beranekaragam (H. A.R Tilaar, 2003: 167).

Proses ini terus berlanjut sampai pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kita lihat wacana multikulturalisme

muncul, misalnya pada waktu penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika pada 18 Agustus 1945 Bung Hatta menolak dimasukkannya tujuh suku kata dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu “pemberlakuan syariat Islam di Indonesia bagi para pemeluknya”. Hal ini menunjukkan kesepakatan para pemimpin rakyat Indonesia terhadap kebinekaan bangsa dan eksistensi kebudayaan masyarakat Indonesia. Pandangan multikulturalisme ini juga tergambar di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui TAP MPR Tahun 2002 yang menyatakan bahwa seluruh pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diterima tanpa amandemen.

Pandangan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia ini dalam praktik kenegaraan belum dijalankan sebagaimana mestinya. Lambang negara kita Bineka Tunggal Ika, yaitu keragaman dalam kesatuan ternyata ditekankan pada kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Kejatuhan Orde Baru menunjukkan reaksi masyarakat terhadap praktik hidup kenegaraan tersebut. (H. A.R Tilaar, 2003: 166).

Ternyata masyarakat kita ingin menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat Bineka yang selama Orde Baru ditindas dengan berbagai cara untuk mencapai kesatuan bangsa. Demikian juga, praksis sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah mengabaikan kekayaan ke-Binekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi.

Orde reformasi yang membawa angin demokrasi telah menghidupkan kembali wacana pendidikan multikulturalisme sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Dalam era reformasi ini, tentunya ada banyak hal yang perlu ditinjau kembali.

Salah satunya ialah mengenai kurikulum di persekolahan kita dari semua tingkat dan jenis, apakah telah merupakan sarana untuk mengembangkan multikulturalisme ini. Selain masalah kurikulum, juga mengenai otonomi pendidikan yang diberikan pada daerah agar pendidikan merupakan tempat bagi perkembangan kebinekaan kebudayaan kita.

Untuk mencapai hal itu perlu sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang sesuai dan melambungkan ke-Binekaan dalam manajemen melalui manajemen berbasis sekolah dan tanggung jawab dari masyarakat lokal termasuk orang tua terhadap pendidikannya. Namun demikian, mengubah suatu sistem yang sentralistik yang dikenal selama ini kepada suatu sistem yang desentralistik dan multikultural tidaklah semudah membalikan telapak tangan.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural. Kebenaran dan pernyataan ini adalah kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama yang beragam seperti Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, serta berbagai macam aliran kepercayaan. (Ainul Yakin, 2005: 4).

Secara historis, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut sebagai "era reformasi", kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Dalam pandangan Azyumardi Azra, bahwa krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula sejak akhir 1997, pada

gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis Sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara sehingga masyarakat tercabik-cabik akibat krisis yang melanda masyarakat tersebut. (Choirul Mahfud, 2006: 81).

Sementara itu, Indonesia juga mempunyai pengalaman yang tidak kalah menyedihkan, kekerasan, pemberontakan, pembumihangusan dan pembunuhan generasi. Perpecahan dan ancaman disintegrasi bangsa telah terjadi sejak zaman kerajaan Singosari, Sriwijaya dan Majapahit, Goa, Mataram. hingga pada era terkini. Pembunuhan besar-besaran terhadap masa pengikut Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965, kekerasan terhadap etnis Cina di Jakarta pada Mei 1998, perang Islam Kristen di Maluku Utara pada tahun 1999-2003 dan perang etnis antara warga Dayak dan Madura yang terjadi sejak tahun 1931 hingga tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 2000 nyawa manusia melayang sia-sia adalah bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. (Ainul Yakin, 2005: 25).

Setelah uraian yang cukup panjang di atas, relevansi pendidikan multikultural dalam pengembangan masyarakat Indonesia dewasa ini sangat diperlukan, lebih-lebih di era reformasi kita bertekad untuk membangun masyarakat baru yang demokratis. maka pendidikan multikultural menempati tempat yang sangat sentral dalam pembinaan generasi Indonesia baru. Namun demikian, telah kita lihat pula bahwa penyusunan dan perumusan konsep pendidikan multikultural tidaklah mudah, apalagi konsep pendidikan multikultural berkaitan dengan konsep-konsep yang lebih besar seperti masalah identitas bangsa, kebudayaan nasional, hak asasi manusia, kekuasaan dan bahkan tidak terlepas dari perspektif global. Uraian selanjutnya ingin mengetengahkan berbagai

masalah fundamental yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di masyarakat Indonesia dalam rangka membangun masyarakat Indonesia baru. (H. A.R Tilaar, 2003: 176).

b. Ciri-Ciri Pendidikan Multikultural

Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat dari konsep pendidikan multikultural yang ingin diterapkan di segala sendi kehidupan, sebagai wujud dan sifatnya. Pertama, *Inkulturasi dan sosialisasi*, Kedua, *Etnosentrisme dan Relatifisme Kultur*, Ketiga, *Prejudis dan Stereotip*, Keempat, *Diskriminasi*. Keempat hal inilah yang menjadi dominan dalam pembicaraan pendidikan multikultural. Disini penulis ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan keempat hal tersebut.

1. Inkulturasi dan sosialisasi

Semua orang dalam sebuah kelompok masyarakat mempunyai kultur sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini terjadi karena secara tidak langsung setiap individu pada tiap-tiap kelompok masyarakat akan menerima kultural yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga orang tersebut dapat memahami nilai-nilai yang berlaku dalam kelompoknya. Proses inilah yang disebut "*inkulturasi*". Sedangkan proses pembelajaran secara sosial dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan seseorang dapat memahami norma-norma kultural yang berlaku di dalam kelompoknya adalah sebuah proses transfer kultur yang disebut "*sosialisasi*" (Ainul Yakin 2005: 13)

2. *Etnosentrisme dan Relativisme Kultur*

Kebiasaan seseorang yang cenderung memberikan penilaian negatif terhadap kultur orang lain, mengukur dan bahkan menghukum kultur orang lain berdasarkan kulturenya sendiri, kejadian seperti ini disebut *etnosentrisme*. Misalnya kita sering mengatakan orang-orang Irian Jaya masih banyak yang hidup sebagai manusia primitif, kata primitif di sini memiliki kecenderungan negatif. Tidak boleh kita memposisikan negatif kultur orang lain.

Hal ini bisa terjadi karena adanya *relatifisme kultural* yaitu bahwa tingkah laku dan adat-istiadat yang ada pada kultur orang lain tidak dapat diukur dan dinilai menggunakan standar yang ada pada kultur lainnya. (Ainul Yakin, 2005: 14).

3. *Preajudis dan Stereotip*

Kata *prejudis* secara etimologi berasal dari penggabungan dua kata yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *prae* yang berarti "sebelum" dengan kata *judicium* yang berarti "penilaian akhir". Dan penggabungan kata itu, kata *prejudis* dapat diartikan menjadi "sebuah penilaian akhir tanpa dilandasi dengan bukti bukti terlebih dahulu". Sedangkan secara sosiologis, *prejudis* adalah sebuah opini, sikap, kepercayaan dan perasaan yang negatif dan tidak fair terhadap seseorang atau kelompok masyarakat lain.

Sedangkan *stereotip* adalah memberikan penilaian terhadap sifat-sifat sebagai ciri-ciri khusus yang *typical dan identical*, yang ada pada seseorang atau golongan masyarakat tertentu. Misalnya dengan mengatakan gadis dari suku

Sunda adalah materialistik, orang Padang itu pelit, orang Jawa kelihatan halus padahal sadis dan lainnya. (Ainul Yakin, 2005: 16-17)

4. *Diskriminasi*

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap orang atau kelompok lain. Diskriminasi memiliki hubungan kuat dengan relasi antara kelompok yang dominan dengan yang minoritas karena perlakuan yang tidak adil biasanya dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok minoritas. Perlakuan tidak adil atau *diskriminatif* ini bisa terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan lainnya. (Ainul Yakin, 2005: 21)

c. Tujuan Pendidikan Multikultural

Setelah kita melihat ciri-cirinya sekarang kita akan melihat apa tujuannya? Pendidikan multikultural mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya dapat dicapai dengan baik.

Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan dalam pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan maupun mahasiswa umum. Harapannya adalah apabila mereka memiliki wacana pendidikan multikultural yang baik maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa dalam mata pelajaran yang diajarinya.

Akan tetapi, juga mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural

yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didik. (Ainul Yakin, 2005: 26).

Adapun tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah, peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis dan humanis.

Mengapa dalam tujuan awal dijelaskan perlu membangun wacana pendidikan multikultural pada guru? Tentunya hal ini terkait posisi guru yang menjadi faktor utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat di sekolah. (Ainul Yakin, 2005: 61).

F. Strategi Pendidikan Multikultural

Agar pendidikan lebih multikultural, maka kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peran guru harus dibuat multikultural. Isi, pendekatan, dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain (Kompas Cyber Media, 2003).

Misalnya, dalam semua bidang pelajaran dimasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain agar siswa mengerti bahwa dalam tiap budaya, ilmu itu dikembangkan. Contoh-contoh ilmuwan dan hasil teknologi, perlu diambil dari berbagai budaya dan latar belakang termasuk jender. Kesamaan dan perbedaan antar budaya perlu dijelaskan dan dimengerti. Siswa dibantu untuk kian mengerti

nilai budaya lain, menerima dan menghargainya. Misalnya, dalam mengajarkan makanan, pakaian, cara hidup, bukan hanya dijelaskan dan budayanya sendiri, tetapi juga budaya orang lain.

Model pembelajaran dalam kelas pun perlu diwarnai multikultural, yaitu dengan menggunakan berbagai pendekatan berbeda-beda. Penyajian bahan, termasuk matematika, dalam memberi contoh, guru perlu memilih yang beraneka nilai. Buku-buku yang ditulis dalam pelajaran pun perlu disusun untuk menghargai budaya lain dan penghargaan jender.

Dulu banyak buku memuat contoh stereotip budaya tertentu, maka kini harus lebih menyeluruh, termasuk agar tidak bias jender. Dalam Orde Baru, sering karena ditakutkan SARA, banyak buku pelajaran tidak berani memuat simbol atau gambar yang berasal dari agama lain. Alasannya agar tidak ada ketegangan. Menurut saya, di zaman demokrasi ini, dan untuk membantu siswa mengenal dan menghargai, kita tidak perlu takut mencantumkan contoh dari keyakinan dan agama lain. Dengan ditutupi, anak tidak mengerti yang lain, sehingga akan lebih sulit menghargai perbedaan itu.

Suasana sekolah amat penting dalam penanaman nilai multibudaya. Sekolah harus dibangun dengan suasana yang menunjang penghargaan budaya lain. Relasi guru, karyawan, siswa yang berbeda budaya diatur dengan baik, ada saling penghargaan. Anak dari kelompok lain tidak ditolak tetapi dihargai.

Bahkan yang tidak kalah penting, terlebih di tingkat SD-SMU, dekorasi sekolah perlu diatur dengan nuansa multikultur. Meski sekolah itu di Pulau Jawa

hiasan dan dekorasi ruang dibuat beraneka ragam budaya suku-suku yang ada di Indonesia, misalnya, sehingga siswa mengerti nilai lain.

3. Signifikansi Pemikiran Abdul Munir Mul Khan

Bagi Munir Mul Khan, multikultural berangkat dari prinsip bahwasanya yang baik itu adalah perbedaan. Seperti yang disebutkan dalam hadist bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Ini merupakan basis normatif dari pendidikan Islam multikultural jika kita ingin menerapkan dalam dunia pendidikan Islam. Jangan sampai kita menyalahi prinsip dasar ini. Jika ingin memperjuangkan pendidikan multikultural.

Kesalahan pemahaman akan menyebabkan kita akan cepat berbalik arah terhadap pemahaman yang konsisten terhadap multikultural. Sikap latah terhadap isu yang berkembang menjadikan orang mudah terombang-ambing dengan keadaan, ada Kurikulum Berbasis Kompetensi maka ramai-ramai orang membicarakannya tetapi selanjutnya menjelek-jelekkan kurikulum baru tersebut. 5 s/d 6 tahun lalu guru kita membahas dan mengembangkan hermeneutik tetapi tiba-tiba sekarang guru-guru kita yang menentang hermeneutik karena tidak paham sesuatu yang baru menghujatnya pun tidak punya konsep yang benar.

Munir Mul Khan memberikan gagasan pendidikannya, berangkat dari pertanyaan kritis ada tidaknya basis teori pendidikan Islam sebagai dasar penyelenggaraan proses belajar mengajar. Hal ini relevan beliau ajukan jika memandang bahwa pendidikan Islam merupakan sistem tersendiri yang berbeda dengan pendidikan yang lain pada umumnya. (Munir Mul Khan, 2005).

Ditambah adanya pandangan pendidikan Islam memiliki teori sendiri dan karena itu layak diperlakukan serta dikelola secara sendiri. Namun realitasnya, batang tubuh teori pendidikan Islam yang bisa dibedakan dari teori pendidikan lain yang sering kali dituduh sekuler itu menurut Munir Mulkhani tak bisa diperlihatkan. Bahkan secara sadar dan penuh kesengajaan, walaupun enggan diakui, praktik pendidikan Islam dikelola berdasarkan teori dan teknologi pendidikan yang sekuler tersebut. Karena itu, menurut Munir Mulkhani pendidikan Islam tidak lebih sebagai pendidikan bagi orang Islam atau yang dikelola oleh umat atau organisasi Islam.

Bagi Munir Mulkhani sulit dibuktikan bahwa lembaga pendidikan yang selama ini disebut pendidikan Islam berbeda secara teoritis atau secara substansif, media belajar, kurikulum, dan metode yang dipakai-pun persis sama karena memang berangkat dari teori dan konsep yang sama. Sebagian lembaga pendidikan Islam menurut Munir Mulkhani memang mengkaji berbagai bidang ilmu yang berbeda seperti di IAIN, fakultas agama, madrasah, dengan lembaga pendidikan sekuler. Walaupun ia melihat konstruksi ilmu-ilmu tersebut yang disebut *islamic studies* tersebut sama dengan ilmu-ilmu sekuler. Belakangan ini, madrasah sudah disetarakan dengan SMU, bahkan pesantrenpun disetarakan dengan pendidikan umum yang dianggap sekuler, dan IAIN mulai mengubah cara kelembagaan menjadi universitas yang tak beda dengan universitas lainnya kecuali bidang ilmu *islamic studies* yang tidak dikaji oleh universitas pada umumnya. (Munir Mulkhani, 2005)

F. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan, agar tidak menimbulkan kerancuan, atau kesalahan penulisan, dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian bibliografi, karena berkaitan terhadap pencarian terhadap fakta-fakta, hasil pemikiran dan ide-ide Abdul Munir Mul Khan melalui cara mencari, menganalisis lalu membuat interpretasi, serta generalisasi yang dalam hal ini pemikiran Abdul Munir Mul Khan tentang pendidikan Multikultural. Kalau melihat tempat penelitiannya maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis dan menyeluruh. Didalamnya terdapat upaya deskriptif, pencatatan, analisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Pada penelitian deskriptif ini di dalamnya termasuk berbagai tipe perbandingan dan mungkin juga sampai pada usaha menemukan hubungan yang terdapat pada penelitian deskriptif ini.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu historis-filosofis. Yang dimaksud pendekatan historis adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan

memperoleh kesimpulan yang kuat. Sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, dan untuk memahami kenyataan sejarah bahkan untuk dapat memahami situasi sekarang, meramalkan perkembangan yang akan datang. Sedangkan pendekatan filosofis adalah menganalisa sejauh mungkin pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut. Hal ini berguna untuk menganalisis pemikiran Abdul Munir Mulhkan yang dipandang sebagai filsafat, sehingga objek kajiannya dikaji dan didefenisikan secara logis.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dimulai dengan mengumpulkan buku-buku dan karya-karya Abdul Munir Mulhkan sebagai pustaka primer. Dalam hal ini ada beberapa buku yang dijadikan sebagai referensi pokok diantaranya. *Kesalehan Mutlikutural* (2005), *Paradigma Intelektual Muslim* (1993), *Nalar Spiritual Pendidikan* (2002), *Pendidikan Liberal Berbasis Islam* (2002), *Paradigma Intelektual Muslim* (1993), *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren dalam Religiusitas Iptek* (1998).

Sementara pustaka Sekunder meliputi tiga skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan pemikiran Abdul Munir Mulhkan, yaitu: Pertama, “*Pemikiran Abdul Munir Mulhkan Tentang Teologi*: Iwan Khoiruddin:(2003)”. Kedua, *Pemikiran Abdul Munir Mulhkan tentang Neo Sufisme*: Sutamo (2004) Ketiga, *Pemikiran Abdul Munir Mulhkan tentang Pembaharuan Pendidikan Islam: Nuruddin* (2004). Dan buku-buku seputar pendidikan dan pendidikan

multikultural diantaranya buku Syamsul Ma'arif yang berjudul *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (2005). Buku Muhammad Ali yang berjudul *Teologi Pluralis-Multikultural* (2003)

5. Metode Analisa Data

Dalam melakukan analisa data menggunakan pola berpikir induksi yang merupakan cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Atau mengawali suatu penalaran dengan memberikan contoh-contoh tentang peristiwa-peristiwa manusia atau individu yang sejenis, lalu dianalisis, kemudian pemahaman yang dapat ditarik dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum (*generalisasi*). Di samping itu juga menggunakan metode interpretasi, yang berarti tercapainya pemahaman yang benar mengenai kenyataan yang dihadapi atau dipelajari. Interpretasi ini bertumpu pada evidensi objektif dan mencapai kebenaran otentik. Interpretasi memiliki dua aspek, yaitu memahami dan menjelaskan (*hermeneutik*). Pemahaman bagi diri sendiri dan penjelasan bagi orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Tata aturan penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian, penyajian serta pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun bentuk susunannya terurai sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode

BAB II. SEKILAS ABDUL MUNIR MULKHAN, berisi latar belakang sosial-keagamaan, riwayat hidup dan karya-karyanya.

BAB III. ASAS-ASAS PEMIKIRAN ABDUL MUNIR MULKHAN, berisi, Islam agama pembebas, misi pendidikan Islam anti kekerasan, problem keilmuan pendidikan Islam, pendidikan Islam dan kesalehan fungsional, redefinisi studi Islam dan kesalehan multikultural.

BAB IV. PEMIKIRAN ABDUL MUNIR MULKHAN TENTANG PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. Berisi tujuan pendidikan multikultural, kurikulum pendidikan multikultural dan metode pendidikan multikultural,

BAB V. PENUTUP, meliputi kesimpulan saran-saran dan penutup.